PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCES* TERHADAP KINERJA BUM DESA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

THE INFLUENCE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON THE PERFORMANCE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN EAST SUMBA REGENCY

Fransiskus Xaverius Candra Gunawan
Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Timur

ABSTRAK

Keberadaan Bum Desa sebagai sokoguru perekonomian rakyat memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian desa. Namun, hal ini belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal yang disebabkan adanya dualisme peran BUM Desa, yakni sebagai *corporate* dengan tujuan keuntungan dan sebagai Lembaga sosial kemasyarakatan dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana strategi mengelola kelembagaan secara mandiri dan profesional. Oleh karena itu, keberadaan suatu sistim tata kelola perusahaan yang baik sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja BUM Desa. Tujuan penelitian adalah menganalisa sejauh mana kesiapan para pengurus BUM Desa mengelola BUM Desa berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governances*, khususnya transparansi dan akuntabilitas. Obyek penelitian dilakukan pada 30 BUM Desa aktif yang memiliki kepengurusan resmi dan terdaftar dalam kementerian desa. Metode penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan data sekunder dan primer yang diperoleh melalui kuisioner dengan pendekatan skala Likert. Hasil analisis terhadap 144 responden menggunakan analisis SEM menunjukkan penerapan *good corporate governances* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan *t-value* 3.986 dan *p-value* 0,000. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya konkrit untuk meningkatkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara lebih baik dengan mengutamakan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Kata kunci : BUM Desa, Good corporate governance, kinerja, sumba timur.

ABSTRACT

The existence of BUM Desa as the mainstay of the people's economy has an important role in advancing the village economy. However, this has not been fully implemented optimally due to the dualism of the role of BUM Desa, namely as a corporation with the aim of profit and as a social institution with the aim of empowering the local community economy. This requires knowledge and understanding of how to manage institutions independently and professionally. Therefore, the existence of a good corporate governance system is needed to support the performance of BUM Desa. The purpose of the study was to analyze the extent to which the BUM Desa administrators are prepared to manage BUM Desa based on the principles of good corporate governance, especially transparency and accountability. The object of the study was 30 active BUM Desa that have official management and are registered with the village ministry. The research method uses quantitative descriptive analysis techniques based on secondary and primary data obtained through questionnaires with a Likert scale approach. The results of the analysis of 144 respondents using SEM analysis showed that the implementation of good corporate governance had a positive and significant effect on performance with a t-value of 3.986 and a p-value of 0.000. The results of this study recommend the need for concrete efforts to improve the implementation of the principles of transparency and accountability by prioritizing the economic independence of local communities.
Keywords: BUM Desa, Good Corporate Governance, Performance, East Sumba.

I. PENDAHULUAN

Apabila dicermati, maksud dan tujuan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 bukanlah suatu amanat yang mudah dijalankan di era mederen ini, di mana dualisme peran yang berbeda harus dapat berjalan harmonis, yakni sebagai *corporate* yang bertujuan keuntungan maupun fungsi sosial kemasyarakatan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi komunitas lokal. Mohammad Najib et al (2019) mengatakan keberadaan BUM Desa tidak hanya dipandang dari sisi korporat bisnis saja, tetapi juga harus dipandang sebagai organisasi lokal yang berperan sebagai *sokoguru* perekonomian rakyat. Situasi problematik ini sangat nampak pada angka kemiskinan di pedesaan yang masih tinggi, yakni sebesar 13,10 persen penduduk miskin hidup di pedesaan dan 7,89 persen hidup di perkotaan serta 10,14 persen hidup di perkotaan dan pedesaan (BPS, 2022).

Hardilina et al (2022) pernah melakukan penelitian pada kelembagaan BUM Desa di Desa Rasau Jaya tentang strategi perencanaan, pengorganisasian dan pemasaran yang menjelaskan bahwa para pengurus BUM Desa belum dapat mengelola usahanya dengan baik, bahkan masih jauh dari harapan sebagai sokoguru perekonomian rakyat. Hal ini disebabkan peranan Kepala Desa masih sangat kurang yang berdampak pada maksud dan tujuan BUM Desa tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa sebagai penopang ekonomi desa. Gambaran situasi ini sangat berkaitan dengan bagaimana membangun suatu sistim pengelolaan manajemen BUM Desa yang tepat, seperti yang dikatakan oleh Usman et al (2021) bahwa suatu variabel manajemen organisasi, seperti *human capital* dan *physical capital* tidak dapat berjalan sendiri tanpa dilengkapi dengan sistim pengendalian manajemen yang tepat guna memoderasi peningkatan kinerja. Oleh karena itu, kelembagaan BUM Desa perlu menyiapkan perangkat pendukung kinerja yang berfungsi sebagai dasar pengelolaan kinerja untuk menghasilkan kualitas kerja yang bermutu dan berdaya saing tinggi serta memiliki nilai tambah bagi organisasi berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG),* seperti transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, indepedensi dan keadilan.

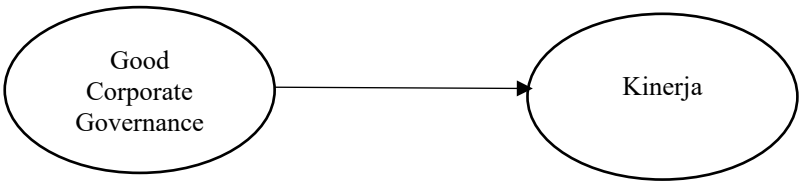
Hal tersebut selaras dengan Ricardo (2022) yang mengatakan bahwa variabel responsibilitas, efisiensi dan akuntabilitas berhubungan dengan *Good Corporate Governance.* Selain itu, variabel partisipasi, transparansi, inklusi, dan kepatuhan terhadap aturan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, misalnya dalam mengatur dan mengakomodir fungsi dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan budaya pengendalian internal yang kuat. Agus Salim Monoarfa et al (2021)pernah meneliti tentang pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Gorontalo Utara dalam perspektif tata kelola perusahaan yang baik yang melaporkan pentingnya GCG dijalankan secara lebih baik oleh para pemangku kepentingan maupun para pengurus BUM Desa untuk menghindari persepsi yang keliru dari masyarakat dan pengelola terkait sumber pendanaan yang berbentuk hibah. Secara khusus, penelitian ini mengatakan perlunya membuat model pengelolaan BUM Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara agar rasa kepemilikan masyarakat dan pengelola BUM Desa dapat meningkat. Hal serupa dikatakan oleh Wulandari & Utami (2020), Sofyan et al (2022), dan Siregar & Muslihah (2019).

Permasalahan serupa juga dialami sebagian besar BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur, di mana data kemiskinan masyarakat perdesaan masih cukup tinggi yang menunjukkan keberadaan BUM Desa belum berfungsi dengan baik sebagai motor penggerak perekonomian desa. BPS (2024) mencatat pada tahun 2022 terdapat 75 ribu atau 28,22 persen penduduk miskin dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 75,66 ribu jiwa atau 28,08 persen. Hal ini menjelaskan bahwa keberadaan BUM Desa yang telah terbentuk sejak tahun 2017 silam belum mampu mengejawantahkan amanat sebagai sokoguru perekonomian masyarakat desa. Hasibuan et al (2020) mengatakan manajemen kinerja sebagai suatu proses berkelanjutan dalam mengidentifikasi, mengukur dan mengembangkan kinerja organisasi, dimana kinerja dan tujuan setiap individu selaras dengan tujuan dan misi organisasi. Di sisi lain, Franceschini et al (2019) menjelaskan sistem manajemen berkualitas berdasarkan ISO-9000 sudah seharusnya diarahkan untuk mengendalikan organisasi (BUM Desa) dengan mempertimbangkan semua aspek kualitas yang berbeda, yakni 1) sumberdaya manusia, 2) pengetahuan dan teknologi, dan 3) praktik kerja, metodologi dan prosedur untuk mencapai target yang ditetapkan.

Sebagai contoh, BUM Desa "Manunggaling Kautaman" di desa Pendem Solo merupakan salah satu BUM Desa yang telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai agen perekonomian desa melalui pengembangan usaha dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi kreatif, seperti pengembangan wisata dan pusat penjualan hasil kerajinan dan kuliner. Hal menarik yang terlihat dari keberhasilan pengurus BUM Desa ini adalah kemampuan dalam menganalisa potensi, peluang dan tantangan untuk digunakan sebagai rencana usaha yang mengikuti tren pasar atau menciptakan pasar baru (webimar, 24/06/2022). Selain itu, manajemen BUM Desa ini telah menunjukkan bagaimana pentingnya peranan *Good Corporate Governance* dalam menciptakan tata kelola kelembagaan BUM Desa yang mandiri dan profesional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian tentang pengaruh *Good Corporate Governances* dalam pengelolaan BUM Desa sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil penelitian Balitbangda Sumba Timur pada tahun 2021 tentang Petani dan Kemiskinan di desa Mutunggeding Kecanatan Umalulu dan desa Laihau Kecamatan Lewa Tidahu yang menjelaskan Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan kelembagaan BUM Desa sebagai lokomotif perekonomian desa guna mengatasi permasalahan petani dan kemiskinan (Gunawan et al., 2022). Pemilihan obyek penelitian dilakukan pada BUM Desa dengan kategori aktif di Kabupaten Sumba Timur dengan kriteria dan persyaratan adalah sebagai berikut : 1) Kelembagaan BUM Desa terdaftar secara resmi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau setidaknya sedang dalam proses pengajuan nama badan usaha, 2) Memiliki kepengurusan resmi pengelolah BUM Desa, dan 3) Memiliki program dan kegiatan yang sedang dan akan dijalankan selama periode penelitian.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembahasan aspek *good corporate governance (GCG)*, khususnya mengkaji pengaruh prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur. Adapun hipotesa yang dibuat adalah variabel X *(good corporate governance)* berpengaruh positif terhadap variabel Y (kinerja).



Gambar 1. *Conceptual framework*

II. METODE

Penelitian ini adalah *quantitative riset* berdasarkan *explanatory survey* yang mengkaji dan menganalisa kausalitas arah hubungan antar variabel pada konstruksi model penelitian, yakni mengukur seberapa besar variabel *good corporate governances* (X) mampu mempengaruhi variabel kinerja (Y). Pengukuran variabel menggunakan skala interval yang nampak pada butir-butir pernyataan kuisioner yang dirancang dengan model penskalaan Likert dengan opsi jawaban disusun dari tingkatan sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Selain itu, Peneliti juga menambahkan opsi jawaban umur, jenis kelamin *(gender)*, status menikah, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pengalaman kerja untuk mendapatkan gambaran tentang responden. Pengamatan menggunakan cakupan waktu *(time horizon)* bersifat *cross section/one shoot* yang dilaksanakan mulai dari bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 dengan teknik survei lapangan langsung kepada responden yang bersifat verifikatif sebagai dasar pengujian statistik.

Secara umum, sebaran populasi memiliki cakupan wilayah yang sangat luas meliputi 22 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur. Oleh karena itu, maka teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan pendekatan *judgment sampling*, yakni elemen sampel yang dipilih memang orang yang menguasai bidangnya. Teknik analisis data menggunakan metode analisis S.E.M *(Structural Equation Modelling)* yang mengintegrasikan

analisis data empirik dengan konstruksi teori yang secara simultan mengevaluasi hasil pengukuran dan komponen-komponennya yang digambarkan dalam suatu model hipotetik.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sumber
Good Corporate Governance (X)	Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.	Kusmayadi *et al* (2015) dan Ricardo (2022)
Kinerja (Y)	Aspek efisiensi meliputi pemantauan proses identifikasi kegiatan, tanggung jawab dan indikator khusus.	Franceschini *et al* (2019) and Aguinis (2014)

Sumber : Data primer (2024)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Statistik Deskriptif

Monika Palupi Murniati et al (2013) mengatakan analisis statistik deskriptif merupakan gambaran nilai-nilai yang menjelaskan keadaan data penelitian yang meliputi rata-rata, standar devisi, varian, maksimum dan minimum.

Tabel 2. Data mean, median dan standard deviation

Name	Mean	Median	Scale min	Scale max	Observed min	Observed max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness	Cramér-von Mises p value
X1.1	4.340	4.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.636	-0.670	-0.441	0.000
X1.2	4.458	4.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.564	-0.803	-0.422	0.000
Y	4.340	4.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.555	-0.719	-0.079	0.000

Sumber : Hasil analisis data primer (2024).

Berdasarkan data tabel yang mewakili 144 responden di 30 BUM Desa, nampak gambaran variabel *good corporate governance* (X) dan kinerja (Y) memiliki nilai *mean* melebihi nilai median, artinya rata-rata responden mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik yang berdampak pada kinerja yang tinggi. Selain itu, nilai standar deviasi menunjukkan nilai data yang cenderung homogen atau kurang bervariasi yang ditandai dengan nilai standar deviasi kurang dari nilai rata-rata tabel. Hal ini menjelaskan tingkat penyebaran data cenderung mendekati nilai *mean* atau rata-rata jawaban responden cenderung sama.

b. Analisis Statistik Inferensial

1. Spesifikasi Model Penelitian

Hasil analisis *inner model* menunjukkan nilai positif 1, di mana X memiliki pengaruh langsung terhadap Y dan pengaruh ini bersifat positif yang menjelaskan adanya hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi pada setiap konstruk. Spesifikasi model struktural sangat penting, karena dapat menggambarkan hubungan yang dihipotesiskan dalam model yang dibangun (Hair *et al*., 2014).

2. Evaluasi Model Pengukuran *(Outer Model)*

Evaluasi model pengukuran bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas setiap pernyataan indikator yang merefleksikan konstruknya melalui tiga cara pengujian, yakni uji *convergent validity,* uji *discriminant validity* dan *internal consistency reliability* (Sarstedt *et al*., 2017; Ali, 2023).

a. Uji *Convergent Validity*

Sarstedt *et al* (2017) mengatakan pengujian validitas konvergen bertujuan untuk mengukur tingkat hubungan antara indikator dan konstruk, dimana pengukur-pengukur suatu konstruk harus memiliki tingkat korelasi yang tinggi dengan konstruk yang diwakilinya, yakni nilai *outer loadings* > 0,7 dan *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,5.

Hasil pengujian terhadap 144 responden di 30 BUM Desa aktif di Kabupaten Sumba Timur menunjukkan nilai *outer loadings* di atas 0,7. Hal ini menjelaskan hubungan antara indikator dan konstruk adalah kuat, seperti nampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Matriks *Outer Loadings*

	Good Corporate Governances (X)	Kinerja (Y)	Ket
X1.1	0.902		Valid
X1.2	0.924		Valid
Y		1.000	Valid

Sumber : Hasil analisis data primer (2024).

Selain itu, pengujian *Average Variance Extracted (AVE)* menunjukkan nilai AVE lebih dari 0,5, artinya terdapat validitas konvergen yang memadai dan ideal pada setiap konstruk reflektif, yaitu nilai konstruk X sebesar 0,834 yang menjelaskan indikator prinsip transparansi ($X_{1.1}$) dan prinsip akuntabilitas ($X_{1.2}$) mampu mencerminkan konstruk Y sebesar 83,4 persen.

Tabel 4. Nilai Average variance extracted (AVE)

	Average variance extracted (AVE)	Ket
Good Corporate Governances (X)	0.834	Valid

Sumber : Hasil analisis data primer (2024).

b. Uji *Discriminant Validity*

Sarstedt *et al* (2017) mengatakan pengujian *discriminant validity* bertujuan untuk mengetahui apakah suatu indikator reflektif benar-benar menjadi pengukur yang baik bagi konstruknya dibandingkan konstruk lainnya, seperti nampak dalam tabel 4 di bawah ini. Hasil pengujian menjelaskan adanya nilai validitas diskriminan yang kuat dan kredibel pada setiap konstruk yang ditunjukkan nilai *outer loadings* yang lebih besar dari nilai *cross loading,* artinya pernyataan-pernyataan indikator yang terdapat dalam kuisioner mampu mengungkapkan secara tepat setiap konstruk yang diwakili dan membuat perbedaan dengan konstruk lainnya.

Tabel 4. Nilai *Cross Loadings*

	Good Corporate Governance (X)	Kinerja (Y)	Ket
X1.1	0.902	0.478	Valid
X1.2	0.924	0.567	Valid
Y	0.575	1.000	Valid

Sumber : Hasil analisis data primer (2024).

Selain itu, pengukuran kriteria Fornell-Larcker *(Fornell-Larcker criteria)* menunjukkan nilai akar kuadrat konstruk yang lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk

lainnya. Hal ini menjelaskan adanya perbedaan yang kuat dan signifikan yang ditampilkan oleh konstruk terhadap konstruk lainnya.

Tabel 5. Penilaian Kriteria Fornell-Larcker *(Fornell-Larcker criterion)*

	Good Corporate Governance (X)	Kinerja (Y)	Ket
Good Corporate Governance (X)	0.913		Valid
Kinerja (Y)	0.575	1.000	Valid

Sumber : Hasil analisis data primer (2024).

Pada kolom data pertama, nampak konstruk *Good Corporate Governance (X)* memiliki nilai 0,913 lebih besar dari nilai konstruk lainnya, artinya konstruk X mampu membuat perbedaan atau keberagaman sebesar 0,913 atau 91,3 persen terhadap konstruk lainnya. Di sisi lain, hasil penilaian *Heterotrait–Monotrait Ratio (HTMT)* menunjukkan tingkat perbedaan yang konsisten antar konstruk, yakni nilai HTMT yang kurang dari 0,9, artinya konstruk mampu membuat perbedaan yang baik dalam hubungan antar konstruk *(heterotrait)* maupun dalam konstruk *(monotrait),* yaitu perbedaan sebesar 63,9 persen yang dapat membedakan dengan konstruk lainnya.

Tabel 6. Penilaian *Heterotrait–Monotrait Ratio (HTMT)*

	Good Corporate Governance (X)	Ket
Good Corporate Governance (X)		
Kinerja (Y)	0.639	Valid

Sumber : Hasil analisis data primer (2024).

c. Uji *Internal Consistency Reliability*

Pengujian *internal consistency reliability* bertujuan untuk mengetahui seberapa mampu indikator-indikator mengukur konstruk latennya (Sarstedt *et al*., 2017). Hasil penilaian *internal consistency reliability* menunjukkan nilai *Cronbach's alpha* maupun *composite reliability* di atas 0,8, artinya terdapat hubungan yang konsisten dan kuat pada indikator dan konstruk.

Tabel 7. Nilai Validitas dan Reliabilitas Komposit

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)	Ket
Good Corporate Governance (X)	0.801	0.809	0.909	0.834	Valid

Sumber : Hasil analisis data primer (2024).

d. Evaluasi Model Struktural *(Inner Model)*

Ali (2023) mengatakan evaluasi model struktural *(inner model)* bertujuan untuk mengetahui gambaran hubungan antar variabel laten, yakni dengan cara mengecek kolinearitas potensial antar variabel laten (Hair *et al*., 2014) dan mengukur kemampuan prediksi model menggunakan koefisien determinasi (R2), *cross-validated redundancy (Q2), effect size (f2)*, dan

path coefficients (Sarstedt *el al*., 2017). Oleh karena itu, maka evaluasi model struktural dilakukan dengan 2 cara, yakni :

a. Pengukuran Kolinearitas Potensial Antar Variabel Laten

Hasil analisis *Variance Inflation Factor (VIF)* menunjukkan tidak adanya korelasi antar konstruk, yakni nilai VIF konstruk kurang dari 5. Hal ini menjelaskan adanya hubungan kolinearitas potensial yang baik dan terukur antar variabel laten X dan Y. Hair *et al* (2014) mengatakan pengecekan kolinearitas potensial antar variabel laten bertujuan untuk mengestimasi model dan menghindari terjadinya bias dalam pengukuran.

Tabel 8. Nilai *Variance Inflation Factor (VIF) – Inner Model*

	VIF	Ket
Good Corporate Governance (X) -> Kinerja (Y)	1.653	Valid

Sumber : Hasil analisis data primer (2024).

b. Pengukuran Kemampuan Prediksi Model

Sarstedt *et al* (2017) mengatakan koefisien determinasi atau *R-square* adalah cara untuk menilai seberapa besar konstruk eksogen dapat menjelaskan konstruk endogen dengan nilai yang diharapkan berkisar antara 0 dan 1, dimana nilai 0,75 dikatakan kuat, 0,50 dikatakan moderat dan 0,25 dikatakan lemah. Sedangkan Chin (1998) dan Ghozali & Latan (2015) mengatakan nilai *R-square* 0,67 sebagai kuat, 0,33 sebagai moderat, dan 0,19 sebagai lemah.

Tabel 9. Nilai *R-square* dan *R-square adjusted*

	R-square	R-square adjusted	Ket
Good Corporate Governance (X)	0.395	0.386	Valid
Kinerja (Y)	0.417	0.404	Valid

Sumber : Hasil analisis data primer (2024)

Hasil analisis *R-square* menunjukkan terdapat hubungan pengaruh yang lemah antar konstruk, yakni nilai *R-square* Y sebesar 0,417 atau 41,7 persen dan nilai *R-square adjusted* sebesar 0,404 atau 40,4 persen. Namun, hasil ini masih dapat diterima karena variabel eksogen secara bersama-sama dan simultan mampu mempengaruhi variabel endogen yang ditunjukkan dengan nilai *R-square* lebih besar dari nilai *R-square adjusted*. Oleh karena itu, maka terdapat dualisme sikap dalam menyatakan hasil penilaian *R-square* dalam penelitian ini, yakni : 1) merujuk pendapat Sarstedt *et al* (2017), maka hubungan pengaruh antar variabel dapat dikatakan lemah, yakni kurang dari 0,50, dan 2) jika merujuk pada pendapat Chin (1998), maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai nilai yang moderat, yakni berada di rentang 0,33 sampai 0,67.

Pada analisis *Cross-Validated Redundancy (Q2)* menunjukkan hasil penilaian *Goodness of Fit (GoF) index* berdasarkan kriteria nilai Stone Geisser Q2 sebesar 0,647, artinya terdapat *predictive relevance* yang ideal pada model, yakni nilai *Q-square* berada di atas 0. Adapun perhitungan dilakukan dengan rumus : $Q2 = 1 – (1 – R1\ 2) (1 – R2\ 2) … (1- Rp\ 2)$ atau

Q-square = 1 – R-square endogen

$Q2 = 1 – (1- \text{R-square } Y_1) (1- \text{R-square } Y_1)$
$= 1 – (1- 0.395) (1 - 0.417)$
$= 1 – (0,605 \times 0,583)$
$= 0,647$

Selain itu, hasil penilaian *effect size (f2)* atau *F-square* dalam tabel 10 menunjukkan besarnya pengaruh pada hubungan konstruk X dan Y, yakni 0,149 merupakan pengaruh hubungan antar konstruk yang kecil (Sarstedt *et al*., 2017).

Tabel 10. Nilai *F-square*

	Kinerja (Y)
Good Corporate Governance (X)	0.149

Sumber : Hasil analisis data primer (2024)

Di sisi lain, Sarstedt *et al* (2017) mengatakan analisis *direct effects* atau nilai *path coefficients* dapat menjelaskan adanya hubungan atau pengaruh langsung dari sebuah konstruk atau variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen yang berada pada kisaran nilai antara -1 sampai +1, dimana nilai mendekati +1 menjelaskan adanya hubungan positif dan sebaliknya nilai mendekati -1 dapat dikatakan adanya hubungan negatif.

Tabel 11. Nilai *Path Coefficients*

	Kinerja (Y)	Ket
Good Corporate Governance (X)	0.379	Positif

Sumber : Hasil analisis data primer (2024).

Data di atas menunjukkan nilai *direct effects* yang memiliki hubungan langsung antar konstruk bersifat positif, yaitu : Variabel X *(good corporate governances)* berpengaruh positif terhadap variabel Y (kinerja).

c. Koefisien Jalur dan Uji Hopotesis *(path coefficient)*

Hair *et al* (2014) mengatakan analisis hubungan atau pengaruh dapat diperoleh dengan prosedur *bootstrapping* untuk melihat signifikansi dan kekuatan hubungan tersebut dan sekaligus untuk menguji hipotesis, dengan cara sebagai berikut : ***pertama***, jika nilai t-hitung *(t-value)* > t-tabel (1.96), maka hipotesisnya berpengaruh dan jika nilai t-hitung *(t-value)* < t-tabel (1.96), maka hipotesis nya tidak berpengaruh. ***Kedua***, jika taraf signifikansi $\alpha < 5\%$ (0.05), maka hipotesisnya signifikan dan jika taraf signifikansi $\alpha > 5\%$ (0.05), maka hipotesisnya tidak signifikan. Data tabel 11 menjelaskan hubungan X dan Y memiliki pengaruh dan hubungan yang kuat (signifikan) antar konstruk yang ditunjukkan dengan nilai t statistik lebih besar dari 1,96 (signikansi 5%), yakni *t-value* sebesar 3.986 dan *t-value* sebesar 0,000.

Tabel 12. Nilai *Path Coefficients* berdasarkan Analisis *Bootstrapping*

	Original sample (O)	**Sample mean (M)**	**Standard deviation (STDEV)**	**T statistics (|O/STDEV|)**	**P values**
Good Corporate Governances (Y1) -> Kinerja (Y2)	0.368	0.368	0.092	3.986	0.000

Sumber : Hasil analisis data primer (2024).

Berdasarkan hasil analisis statistik di atas, maka jawaban terhadap hipotesa adalah variabel X *(good corporate governances)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (kinerja).

d. Diskusi

1. Keadaan BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur : Masalah dan Ancaman

Sejak tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur telah berhasil melakukan upaya penguatan kelembagaan BUM Desa, di mana DPMD (2023) menyebutkan sebanyak 140 BUM Desa yang tersebar merata di setiap desa telah memiliki Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) serta program kerja tahunan. Namun, baru sebanyak 33 BUM Desa atau 24 persen yang telah berbadan hukum dan 76 persen BUM Desa lainnya sedang dalam proses pengajuan badan hakum pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Hal ini menunjukkan masih perlu dilakukan lagi giat manajemen untuk meningkatkan penguatan kelembagaan BUM Desa.

Situasi dan kondisi ini tentunya tidaklah mudah dilaksanakan dalam era moderenisasi, di mana kelembagaan BUM Desa membutuhkan faktor *human capital* yang unggul maupun sistim manajemen pengelolaan usaha yang tepat. Hasil riset yang dilaksanakan dari bulan November 2023 sampai Januari 2024 menunjukkan sebagian besar pengurus BUM Desa di 30 BUM Desa belum mampu memaksimalkan pemanfaatan ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja. Hal ini menunjukkan adanya masalah dan potensi ancaman bagi keberlanjutan organisasi yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah dan Desa serta Pemangku kepentingan lainnya, khususnya penguasaan keterampilan terkini dan peningkatan pengalaman kerja.

Hasil observasi menggambarkan sebagian besar pengurus BUM Desa adalah masyarakat petani dengan komposisi gender lebih banyak diwakili oleh kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Selain itu, sebagian besar para pengurus ini memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, yakni tingkat Pendidikan SD, SLTP dan SLTA.



Grafik 1. Komposisi kepengurusan BUM Desa berdasarkan jenis kelamin
Sumber : Hasil analisis data primer (2024)

Di sisi lain, permasalahan krusial yang dihadapi manajemen BUM Desa adalah konflik kepentingan *(conflict of interest)* yang disebabkan belum optimalnya pengelolaan manajemen berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governances)*. Hal ini, tentunya sangat memengaruhi kinerja pengelolaan BUM Desa, di mana peran Kepala Desa masih sangat mendominasi peran antar fungsi dalam struktur organisasi.

2. Mengkaji dan menganalisa bagaimana pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governances* terhadap peningkatan kinerja BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur.

Kusmayadi et al (2015) mengatakan *Good Corporate Governance (GCG)* adalah seperangkat peraturan (sistem) yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, meliputi prinsip transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, indepedensi, dan keadilan. Selain itu, Ricardo (2022) menegaskan bahwa suatu organisasi (BUM Desa) perlu menjalankan prinsip transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, indepedensi dan keadilan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini yang dimaksudkan oleh Usman et al (2021) bahwa manajemen kinerja perlu dilengkapi dengan alat kontrol sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, seperti konsep GCG.

Hasil survey terhadap 144 responden yang bekerja pada 30 BUM Desa aktif di Kabupaten Sumba Timur menunjukkan sebagian besar pengurus, yakni sebanyak 127 responden atau 90 persen menyatakan respon positif bahwa mereka telah memahami dan menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUM Desa. Sedangkan 10 persen lainnya menyatakan sikap ragu-ragu, artinya hal tersebut belum nampak secara pasti dalam praktik-praktik pengelolaan BUM Desa. Hal ini selaras dengan hasil analisis *outer loadings* yang menunjukkan nilai di atas 0,7. Artinya, terdapat hubungan yang kuat antara konstruk dan indikator penelitian. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil uji model struktural yang menunjukkan adanya pengaruh langsung yang bersifat positif dari X terhadap Y, yakni nilai positif 1 yang artinya jika penerapan *good corporate governances* (X) meningkat satu satuan unit maka variabel kinerja (Y) dapat meningkat 100%.

Namun, masih terdapat permasalahan yang ditunjukkan dengan nilai *F-square* yang rendah, yakni sebesar 0,149, artinya hubungan antar konstruk X dan Y memiliki pengaruh yang kecil. Hal ini menjelaskan situasi penerapan *good corporate governances* dalam pengelolaan BUM Desa belum terlalu kuat mempengaruhi kinerja. Dalam amatan, terlihat para pengurus BUM Desa yang baru terbentuk *(reorganisasi)* mengalami hambatan dalam koordinasi dan sinergitas antar fungsi. Hal ini yang menjadi alasan mengapa peranan Kepala Desa masih sangat mendominasi pengelolaan BUM Desa, khususnya dalam membimbing, mengontrol dan mengawasi kerja para pengurus baru. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan Desa perlu melakukan penguatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai *R-square* sebesar 0,147 atau 14,7 persen yang menjelaskan adanya hubungan yang lemah pada konstruk X *(good corporate governances)* terhadap konstruk Y (kinerja). Namun, hasil ini masih dapat diterima karena nilai *R-square* lebih besar dari nilai *R-square adjusted*, yakni sebesar 0,404 atau 40,4 persen yang menjelaskan konstruk X mampu memengaruhi konstruk Y. Usman et al (2021) mengatakan faktor *human capital* dan *physical capital* organisasi tidak dapat berjalan sendiri tanpa dilengkapi dengan sistim pengendalian manajemen yang tepat guna memediasi peningkatan kinerja. Selain itu, hasil analisis *direct effects* telah menunjukkan nilai *path coefficient* yang positif, yakni sebesar 0,379 atau 37,9 persen. Hal ini sesuai dengan hasil analisis *bootstrapping* yang menunjukkan nilai t statistik sebesar 3.986 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai p sebesar 0 dengan signifikansi 5% yang menegaskan bahwa hipotesa dapat diterima, yakni penerapan prinsip-prinsip *good corporate governances* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur.

Hasil analisis deskriptif juga menguatkan argumentasi teritik, di mana dalam proses validasi dan pengkajian masalah telah menjelaskan bahwa peranan Kepala Desa sebagai komisaris masih sangat mendominasi kepengurusan yang baru terbentuk (reorganisasi) yang disebabkan minimnya kapasitas kepengurusan BUM Desa. Verhezen & Abeng (2022) menjelaskan tata kelola perusahaan yang baik melibatkan fungsi pengawasan dan pembinaan manajemen puncak dimana anggota dewan yang ditunjuk oleh pemilik, berfungsi sebagai pemelihara suatu organisasi. Dasar pemikiran inilah yang melandasi perlunya penguatan *good corporate governances* dalam pengelolaan kelembagaan BUM Desa dengan cara meningkatkan fungsi dewan ke arah yang benar, khususnya bagaimana strategi untuk mengkoneksikan secara harmonis modal sumberdaya manusia dan *good corporate governances* itu sendiri.

Oleh karena itu, maka langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUM Desa yang baik perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah, Desa dan pemangku kepentingan lainnya, seperti sosialisasi dan pendampingan. Hitt et al (2011) mengatakan pengelolaan sumberdaya manusia yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan, seperti Whole Foods Market yang telah melakukan sejumlah hal dengan benar, sehingga mencapai kesuksesan besar. Hal menarik adalah pada pendekatan yang diterapkan secara partisipatif yang disebut sebagai “demokrasi di tempat kerja” yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada setiap anggota tim untuk

berekepresi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, faktor kompensasi merupakan daya tarik tersendiri untuk mencapai maksud dan tujuan di atas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governances*, khususnya transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur. Selain itu, hasil penelitian telah memberikan suatu pemahaman penting pada pokok persoalan bahwa penerapan sistim tata kelola perusahaan yang baik atau GCG membutuhkan komitmen yang kuat dan cara pandang yang sama dari para pemangku kepentingan maupun pengurus untuk mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Sumba Timur.

Oleh karena itu, maka strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Desa untuk meningkatkan kualitas *Good Corporate Governances* adalah dengan cara meningkatkan fungsi dewan ke arah yang benar, khususnya bagaimana strategi untuk mengkoneksikan secara harmonis modal sumberdaya manusia dan *good corporate governances* itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui pembukaan ruang partisipasi yang luas dan bertanggungjawab kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan kreatifitas dan profesionalisme. Pada titik inilah peran dan fungsi BUM Desa sebagai sokoguru perekonomian rakyat dapat terwujud.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan dengan hormat kepada : 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur yang telah berkenan memberikan ijin penelitian ini, 2. Prof. Hapzi Ali sebagai pembimbing utama penelitian, 3. Dr. Ake Wihadanto sebagai pembimbing utama penelitian, dan 4. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Salim Monoarfa, M., Fransisca Dungga, M., Bakari, N., & Rahayu Laiya, S. (2021). Quality of Management of Village Owned Enterprises (BUMDesa) Viewed from the Perspective of Good Corporate Governance (GCG) in North Gorontalo Regency. In *International Journal of Innovative Science and Research Technology* (Vol. 6, Issue 9). www.ijisrt.com

Ali, Hapzi & Limakrisna, Nandan. 2013. Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi). Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Juni 2013. x, 184 hlm.; 25 cm . ISBN 978.

Ali, Hapzi. 2023. SEM PLS (Smart Pls). Bahan Ajar Program Pasca Sarjana dan Doktoral. Universitas Bhayangkara. Jakarta

BPS. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. Biro Pusat Statistik

BPS. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Biro Pusat Statistik

DPMD. 2022. Data Badan Usaha Milik Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur. Waingapu

DPMD. 2023. Data Badan Usaha Milik Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur. Waingapu.

Franceschini, F., Galetto, M., & Maisano, D. (2019). *Management for Professionals Designing Performance Measurement Systems*. http://www.springer.com/series/10101

Gunawan, F. X. C., Mesa, A. N. L. M., Syah, R. F., Simandjorang, B. M. T. V., & Fitri, S. E. (2022). Farmers and Poverty: Farmer Complaints and Problems in Mutunggeding Village. *Jurnal Bina Praja*, *14*(3), 529–541. https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.529-541

Hardilina, P., Mardhalena, A., Anwar, H., Sulisdiani, I., Tua Parlindungan Sihaloho, N., ProfDrHHadari Nawawi, J., & Ahmad Yani, J. (2022). Penguatan Manajemen BUMDes Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masayarakat Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* , *Volume 1 Nomor 2,*. http://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp

Hasibuan, S., Ikatrinasari, Z. F., & Hasbullah. (2020). *Desain Sistem Manajemen Kinerja : Kasus Industri Manufaktur dan Jasa: Vol. Pertama* (Pertama). Ahlimedia Press.

Hitt, M. A., Miller, C. C., & Colella, A. (2011). *Ogranizational Behavior*.

Kusmayadi, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance*. https://www.researchgate.net/publication/333106273

Mikrostat. 2019. Smart PLS, Menyusun Model Riset. https://www.iqra.my.id/2018/02/smartplsmenyusunmodelriset.html. Diakses tanggal, 25-03-2024.

Mohammad Najib, Aziz Setyawijaya Nindya Putra, Arif Koes Hernawan, Kukuh Setyono, Shavira Novi Safitri, & Ayu Dini Kartika Putri. (2019). *BUMDES : Pembentukan dan Pengelolaannya: Vol. Pertama* (Pertama). Pusdatin Balilatfo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Monika Palupi Murniati, St. Vena Purnamasari, Stephana Dyah Ayu, R., Agnes Advensia MSi, C., Ranto Sihombing, & Yusni Warastuti. (2013). *Alat-Alat Pengujian Hipotesis*.

Ricardo, R. (2022). *Relationship Of Responsive, Efficiency And Accountability To Good Corporate Governance (Literature Review Study)*. *3*(6). https://doi.org/10.31933/dijms.v3i6

Siregar, H. O., & Muslihah, S. (2019). Implementation of good governance principles in village government context in Bantul Regency, Yogyakarta. In *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* (Vol. 6, Issue 4).

Sofyan, A. Y., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Implementasi Good Governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, *10*(2), 292–308. https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5723

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. ISBN 979-8433-64-0. AlfaBeta Bandung. Bandung.

Usman, A., Wirawan, H., & Zulkifli. (2021). The effect of human capital and physical capital on regional financial condition: the moderating effect of management control system. *Heliyon*, *7*(5). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06945

Verhezen, P., & Abeng, T. (2022). *The Boardroom : a guide to effective leadership and good corporate governance in Southeast Asia*.

Wulandari, N., & Utami, I. (2020). *Eksplorasi Mekanisme Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa*. www.kemendesa.go.id